



PROSES DEMOKRATISASI MYANMAR MENUJU PEMILU PRESIDEN TAHUN 2012

SITA HIDRIYAH^{*)}

Abstrak

Belakangan ini, Myanmar tidak henti-hentinya menggelar berbagai perubahan yang mengejutkan banyak pihak. Parlemen Myanmar yang baru terpilih Januari 2011 sempat dipandang sebelah mata oleh para pengamat asing. Tapi rezim baru Myanmar berhasil mengejutkan dunia dengan melakukan banyak aksi reformasi. Aksi-aksi tersebut antara lain adalah pembebasan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, melepaskan sejumlah tahanan politik lain, serta mengeluarkan kebijaksanaan yang membebaskan warga untuk berdemonstrasi. Dengan merujuk pada hal-hal tersebut, Myanmar telah berhasil menciptakan sesuatu yang sangat esensial dalam politik yakni demokrasi. Hal ini menjadi langkah awal yang baik bagi Myanmar untuk dapat terus melakukan perubahan.

Pendahuluan

Negara Myanmar (yang pada awalnya bernama Burma) akan mengadakan Pemilihan Umum (pemilu) pada tahun 2012. Pemilu yang kemungkinan diadakan bulan Maret sebelumnya diadakan tahun 2010, namun pemilu yang diadakan dirasakan penuh dengan kecurangan sehingga hasil pada pemerintahan yang terbentuk tidak mencerminkan aspirasi rakyat Myanmar secara keseluruhan. Ikon demokrasi di negara Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah oleh junta militer Myanmar pada 12 November 2010. Suu Kyi merupakan simbol perlawanan yang tangguh dan konsisten terhadap militerisme dan kesewenangan rezim antidemokrasi. Hal inilah yang membuat Suu Kyi menjadi salah satu inspirasi bagi kemajuan dan perkembangan demokrasi di dunia. Ia menjadi tahanan rumah sejak tahun 1990 setelah keputusan pemilu yang memenangkannya dianulir militer

dengan alasan yang tidak jelas. Sejak saat itu Myanmar dipimpin oleh junta militer. Selain pembebasan Suu Kyi, perubahan juga dialami oleh sejumlah tahanan politik yang akan segera dibebaskan hingga Januari. Sampai saat ini masih terdapat 600-1.000 tahanan politik yang masih belum dibebaskan oleh pemerintah Myanmar.

Proses Demokratisasi Myanmar

Myanmar merupakan negara terbesar kedua di ASEAN setelah Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa. Myanmar dulunya dikenal dengan nama Burma yang lebih mencerminkan dominasi etnik Burma secara etnis dekat dengan Tibet dan China. Etnik Burma memang mayoritas, sedangkan etnik lainnya yaitu Karen, Shan, Rakhine, Mon, Chin, Kachin dan kelompok etnis yang lebih kecil lainnya menjadi ancaman keamanan di dalam negeri dan berkaitan dengan gerakan separatis.

^{*)} Calon Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, email: dearsita@yahoo.com

Sejak kudeta Jenderal Ne Win di tahun 1962, negeri ini jatuh dalam kenistaan dan kutukan. Militer menguasai Myanmar melalui kudeta pada 2 Maret 1962 dan terus menancapkan kekuasaannya dengan menindas warganya sendiri. Setelah hampir 50 tahun, sistem yang kurang lebih menganut model 'dwi fungsi' ini pun bakal berakhir dalam waktu dekat. Tidak dapat dipungkiri jika ASEAN menjadi faktor yang penting dalam mendorong proses demokratisasi Myanmar.

Sejarah politik Myanmar memang pernah mencatat bahwa kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi/*National League for Democracy* (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi pada pemilihan umum 1990 tidak diakui kemudian junta militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar dan menahan pimpinan NLD. Dampaknya adalah Myanmar tidak hanya terjerumus dalam sistem pemerintahan yang otoriter, tetapi juga mendapatkan sanksi politik dan ekonomi dari komunitas internasional, khususnya dari Amerika Serikat.

Tanda-tanda positif dari Myanmar dalam menempuh peta jalan demokratisnya memang pada awalnya diragukan. Pemilu yang diselenggarakan pada akhir tahun lalu dicela oleh barat seakan-akan merupakan upaya perpanjangan kekuasaan tentara atau junta militer. Sejak junta berkuasa, Myanmar semakin dikucilkan oleh masyarakat internasional dan memberikan gejolak pada ASEAN. Pada awalnya, tidak seorang pun yakin jika Jenderal (Purn) Thein Sein yang dijadikan presiden akan merintis jalan menuju perubahan di Myanmar. Tetapi, di bawah Presiden Thein Sein berturut-turut Myanmar membuka diri ke luar, melonggarkan kemerdekaan pers, melepas sebagian tahanan politik, membentuk Komnas HAM, menghapus status tahanan rumah bagi Aung Saan Suu Kyi dan mengizinkannya untuk wawancara dengan media barat dan yang terakhir adalah mengizinkan NLD mendaftar kembali sebagai parpol untuk siap mengikuti pemilu yang akan datang.

Sedikit banyak, Myanmar telah mencapai tahapan demokrasi yang demikian. Terkait dengan hal itu, terdapat tiga hal positif yang telah dihasilkan demokrasi Myanmar di dalam negeri.

Pertama, perubahan iklim politik. Jika dulu junta militer menangkap semua aktivis politik yang dinilai membahayakan kekuasaan, kini sebagian dari mereka dibebaskan. Setidaknya 20 ribu tahanan politik telah dibebaskan, termasuk Aung San Suu Kyi di dalamnya setelah menghabiskan 15 tahun sebagai tahanan karena usahanya mengakhiri kekuasaan militer di negeri itu. NLD yang di masa junta militer dinilai sebagai partai terlarang, kini telah masuk ke kancah politik Myanmar. Kedua, catatan hak asasi manusia yang di masa junta militer begitu buruk, kini telah menjadi lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh penasihat hukum Presiden Thein Sein, U Sit Aye beberapa waktu lalu, bahwa konstitusi dan pemerintahan baru telah menjamin promosi hak-hak asasi manusia dengan membentuk Komisi Hak Asasi Manusia. *Ketiga*, para buruh yang di masa junta militer tidak memiliki kebebasan untuk menuntut kesejahteraan, saat ini justru diberikan kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja dan kebebasan untuk melakukan unjuk rasa. Dengan sejumlah perubahan positif itu, dapat dikatakan bahwa pemerintah Thein Sein telah berhasil menciptakan harmoni di Myanmar dengan memberikan ruang kebebasan bagi rakyat dan mengajak serta memberikan kesempatan kepada semua elemen bangsa untuk secara bersama-sama menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik bagi Myanmar yang demokratis.

Pada pemilu 2012 nanti, partai politik pengusung pejuang demokrasi yaitu NLD memastikan akan maju kembali. Pemastian ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya dimana pada bulan November lalu partai tersebut mendaftarkan diri kembali secara resmi. Logo baru telah disiapkan dengan gambar seekor burung merak petarung menatap ke arah bintang besar berwarna putih bersudut lima. Simbol tersebut menggambarkan perjuangan Myanmar menuju perubahan. Simbol lama NLD bergambar topi terbuat dari bambu sudah sangat melekat pada rakyat, dimana tahun 1990 ketika partai tersebut menang telak lalu dianulir junta militer. Pada pemilu tahun 2010, NLD mengundurkan diri karena menganggap sistem aturan main yang ditetapkan sangat

tidak adil serta mengindikasikan jika pemilu hanyalah berpura-pura. Pada saat itu, baik Suu Kyi maupun sebagian besar pengikutnya sepakat memboikot pemilu yang disebabkan komisi pemilu Myanmar menetapkan aturan-aturan yang dinilai curang. Salah satu aturannya adalah dengan melarang mereka yang berstatus tahanan politik untuk ikut dalam pemilu, seperti yang dialami Suu Kyi yang masih berstatus tahanan politik di rumahnya sendiri. Hal ini mengakibatkan Suu Kyi dan tahanan politik lainnya tidak diperbolehkan terlibat dalam pemilu termasuk untuk dicalonkan dan mencalonkan diri.

Pada pemilu lalu, tidak semua pengikut Suu Kyi turut memboikot pemilu. Mereka memilih untuk memisahkan diri dan membentuk partai Kekuatan Demokratis Nasional (NDF). Kini sebagian dari mereka telah menduduki kursi di parlemen bersama anggota parlemen dari partai-partai pendahulu yang dibentuk oleh junta militer. Harapan ini pula yang ingin dicapai oleh Aung San Suu Kyi. Dirinya pun sepertinya mendekati salah satu tujuan perjuangannya. Pemilu berikutnya akan menjadi kesempatan bagi Suu Kyi dan partainya untuk meraih kursi di parlemen negeri itu.

Proses menuju demokrasi tidak hanya ingin dicapai melalui pemilu, namun juga pada kebebasan pers. Pemerintahan Presiden Myanmar saat ini, Thei Sein tak lagi melakukan sensor terhadap isi media massa yang terbit di Myanmar. Tak hanya itu, pemerintahan Thei Sein juga menjanjikan pelonggaran sensor terhadap film dan video pada pemilu mendatang. Kabar baik ini rupanya tidak membuat para jurnalis di negeri itu lantas gembira. Para jurnalis di Myanmar tetap menuntut kebebasan pers yang lebih besar. Janji ini menegaskan bahwa kebebasan pers di Myanmar menjadi pertaruhan saat negeri itu nantinya menjadi Ketua ASEAN pada 2014. Langkah-langkah reformasi politik yang dilakukan Thein Sein untuk membangun demokrasi di Myanmar pun mendapatkan pujian dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon.

Harmoni bagi hubungan luar negeri terhadap Myanmar juga diberikan oleh negara Amerika Serikat. Menteri Luar

Negeri Hillary Clinton menyampaikan apresiasi terkait langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Myanmar. Dalam kunjungannya selama dua hari (3-4 Desember 2011) ia menyatakan bahwa Amerika akan terus mendukung upaya demokratisasi yang sedang berlangsung di Myanmar serta menyambut baik perubahan positif Myanmar.

Kunjungan Clinton ini penting bagi Myanmar mengingat hubungan kedua negara yang tidak pernah membaik sejak tahun 1955. Meskipun Menlu Hillary Clinton mengatakan belum akan mencabut sanksi politik dan ekonomi terhadap Myanmar, namun ia tetap mengakui terdapatnya perubahan ke arah yang lebih baik dan demokratis di Myanmar. Hubungan luar negeri yang harmonis antara Myanmar dan AS ini makin terlihat jelas ketika Clinton mengatakan akan menempatkan kembali duta besarnya di Myanmar. Clinton pun menjanjikan akan memberikan bantuan uang sejumlah 1,2 juta dollar AS untuk mendanai usaha kecil, pelayanan kesehatan, dan dana bagi korban ranjau darat. Selain itu, AS juga berencana akan memberikan bantuan program studi bahasa Inggris terhadap Myanmar.

Makna Demokratisasi Myanmar Bagi ASEAN dan Indonesia

Perubahan positif yang terjadi di Myanmar juga menolong bagi citra ASEAN, karena dalam KTT ASEAN ke-19 di Bali telah diputuskan Myanmar akan menjadi ketua ASEAN di tahun 2014. Penilaian positif ASEAN itu tidak lepas dari hasil kunjungan Menlu Indonesia Marty Natalegawa ke Myanmar beberapa saat sebelum KTT dimulai. Sinyal positif dari Indonesia, yang sejak awal yakin dengan peta jalan demokrasi Myanmar, juga disambut baik oleh Presiden Obama yang kemudian memutuskan untuk mengutus Menlu AS, Hillary Clinton untuk menilai apakah perubahan tersebut murni atau hanya di permukaan.

Kembalinya Myanmar ke tampuk ASEAN dan di lingkungan pergaulan bangsa-bangsa niscaya memberikan dampak positif bagi Asia Tenggara. Myanmar

tergolong negara berukuran menengah di ASEAN dengan jumlah penduduk 60 juta dan memiliki kekayaan alam luar biasa. Potensi ini sudah digarap oleh China yang dikhawatirkan tetap menginginkan Myanmar berada dalam isolasi dan retorika anti barat-nya, dan di pihak lain akan semakin tergantung dengan China.

Kembalinya Myanmar, negeri yang telah menghasilkan Sekjen PBB ketiga kebanggaan rakyat di Asia Tenggara, U Thant, seyogyanya disambut baik oleh rakyat di Asia Tenggara. Dukungan dan iklim yang kondusif menjadi keniscayaan bagi pemerintah dan rakyat Myanmar untuk kembali membangun negeri mereka, dan secara bersama-sama mendorong untuk terciptanya Komunitas ASEAN di tahun 2015. Hingga saat ini, gejala positif di Myanmar dapat terlihat. Diharapkan pengalaman Myanmar untuk kembali ke jalan demokrasi, suatu saat dapat menyumbang bagi upaya Indonesia dengan dukungan banyak negara di dunia dalam memperkuat demokrasi di Asia Tenggara dan Asia Pasifik sebagaimana dicerminkan dalam gagasan pembentukan Bali *Democracy Forum*. Myanmar memiliki peluang emas untuk membuktikan diri apakah mereka serius melakukan reformasi. Peluang untuk menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2014 mendatang telah diberikan kepada Myanmar. Hal inipun menjadi peluang bagi ASEAN dan masyarakat internasional pada umumnya untuk betul-betul mengawal Myanmar pada umumnya.

Penutup

Demokrasi adalah sistem politik terbaik yang dapat menciptakan harmoni, baik di dalam ataupun di luar negeri. Dalam kasus Myanmar, pandangan ini terasa sangat relevan. Sejarah politik Myanmar mulai dari ketidakpengakuan kemenangan NLD di tahun 1990 memberi peluang akan kekuasaan junta militer. Hingga akhirnya Aung San Suu Kyi telah dibebaskan dan sepertinya sudah mendekati salah satu tujuan perjuangannya. Otoritas pemilu di Myanmar sudah mengeluarkan lampu hijau bagi partai NLD untuk maju dan bertarung dalam pemilu tahun depan.

Sesungguhnya ujian bagi rezim berkuasa Myanmar soal komitmennya melakukan reformasi politik akan terlihat nanti saat Aung San Suu Kyi bertarung dalam pemilu sela parlemen yang diperkirakan diadakan sebelum akhir tahun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memuji proses demokrasi di Myanmar. Pemilu yang digelar di negara tersebut menjadi bukti perubahan ke arah demokrasi yang lebih baik. Tentunya kondisi ini dibarengi dengan suasana yang damai dan penuh rekonsiliasi. Banyak pihak yang tidak percaya akan adanya proses reformasi yang tengah berlangsung di Myanmar. Untuk memastikan proses reformasi berjalan sesuai koridornya, perlu dilakukan pengawalan oleh negara-negara ASEAN dan dunia internasional.

Rujukan

1. "Pemilu Myanmar: Partai Pengusung Suu Kyi Umumkan Logo Baru", *Kompas*, 13 Desember 2011.
2. "Myanmar Meniti Menuju Demokrasi", <http://lampung.tribunnews.com/2011/12/12/myanmar-meniti-menuju-demokrasi>, diakses tanggal 16 Desember 2011.
3. "Myanmar Berubah", *Kompas*, 14 Desember 2011.
4. "Partai Aung San Suu Kyi Boleh Ikut Pemilu", <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/13/118371471/Partai-Aung-San-Suu-Kyi-Boleh-Ikut-Pemilu>, diakses tanggal 18 Desember 2011.
5. "Demokratisasi Myanmar Baik Bagi Indonesia Dan ASEAN", <http://indonesia-ryanews.com/berita/berita/fokus/2011/12/06/4599/demokratisasi-myanmar-baik-bagi-indonesia-dan-asean>, diakses tanggal 15 Desember 2011.
6. "Suu Kyi Bertekad Menangi Pemilu Burma", <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/22/278115/39/6/Suu-Kyi-Bertekad-Menangi-Pemilu-Burma>, diakses tanggal 14 Desember 2011.